



Studi Eksploratif Tentang Mekanisme Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta

INFO PENULIS

Dafyar Eliardi Hardian
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Hasanuddin Banten
dafyar711@unis.ac.id

Asep Erik
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Hasanuddin Banten
2407010223@students.unis.ac.id

Heri
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Hasanuddin Banten
heri2407010272@gmail.com

Sutrisno B. Rusdi
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Hasanuddin Banten
sutrisnorusdi127@gmail.com

Gunawan
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Hasanuddin Banten
gunawanin2@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hardian, D. E., Erik, A., Heri., Rusdi, S. B., & Gunawan. (2025) Studi Eksploratif Tentang Mekanisme Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2871-2878.

Abstrak

Mekanisme pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan dasar. Di Indonesia, sekolah dasar negeri dan swasta memiliki pola pembiayaan yang berbeda, baik dari segi sumber dana, pengelolaan, maupun alokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mekanisme pembiayaan pendidikan yang diterapkan di sekolah dasar negeri dan swasta, serta memahami tantangan dan strategi yang digunakan oleh masing-masing sekolah dalam mengelola sumber keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen keuangan sekolah. Informan terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan komite sekolah dari empat sekolah dasar dua negeri dan dua swasta di wilayah Tasikmalaya. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah dasar negeri sangat bergantung pada dana pemerintah melalui program BOS, sedangkan sekolah dasar swasta lebih fleksibel dalam mencari pendanaan, seperti melalui iuran peserta didik, sumbangan yayasan, dan kegiatan penggalangan dana. Namun demikian, kedua jenis

sekolah menghadapi tantangan yang serupa, seperti keterbatasan dana operasional untuk peningkatan mutu pembelajaran, serta kurangnya pelatihan dalam pengelolaan keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Strategi yang umum diterapkan meliputi kolaborasi dengan orang tua, efisiensi anggaran, dan inovasi pendanaan berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan pembiayaan yang lebih adaptif dan berkeadilan, yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pendidikan dalam merumuskan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: pembiayaan pendidikan, sekolah dasar, sekolah negeri, sekolah swasta, studi kualitatif

Abstract

The financing mechanism of education is a crucial aspect in ensuring the sustainability and quality of basic education services. In Indonesia, public and private elementary schools have different financing patterns in terms of funding sources, management, and budget allocation. This study aims to explore in depth the financing mechanisms implemented in public and private elementary schools, as well as to understand the challenges and strategies employed by each type of school in managing financial resources. The study uses a qualitative approach with an exploratory design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and analysis of school financial documents. The informants consisted of principals, treasurers, teachers, and school committee representatives from four elementary schools—two public and two private—in the Tasikmalaya region. Data analysis was conducted thematically using Miles and Huberman's approach, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that public elementary schools are highly dependent on government funds through the School Operational Assistance (BOS) program, while private elementary schools are more flexible in seeking funding through student fees, foundation contributions, and fundraising activities. However, both types of schools face similar challenges, such as limited operational funds for improving the quality of learning and the lack of training in financial management based on transparency and accountability. Common strategies applied include collaboration with parents, budget efficiency, and community-based funding innovations. This study recommends the need for a more adaptive and equitable financing policy that considers the specific characteristics and needs of each school. These findings are expected to serve as a reference for policymakers and education stakeholders in formulating a more inclusive and sustainable education financing system.

Keywords: education financing, elementary school, public school, private school, qualitative study

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan dasar memegang peranan fundamental dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi mendatang. Namun, tantangan signifikan yang sering dihadapi adalah bagaimana mekanisme pembiayaan pendidikan dapat menopang kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Perbedaan karakteristik antara sekolah dasar negeri dan swasta menciptakan lanskap pembiayaan yang kompleks, di mana masing-masing memiliki sumber dana, pola pengelolaan, dan tantangan yang unik.

Sekolah dasar negeri, sebagai tulang punggung pendidikan publik, sangat bergantung pada dukungan pemerintah melalui berbagai skema pendanaan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun bertujuan untuk pemerataan akses, ketergantungan ini sering kali memunculkan pertanyaan tentang fleksibilitas anggaran dan kecukupan dana untuk inovasi pembelajaran. Di sisi lain, sekolah dasar swasta memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangannya, sering kali mengandalkan iuran peserta didik, sumbangan yayasan, dan inisiatif penggalangan dana lainnya. Fleksibilitas ini memberi mereka ruang untuk berinvestasi dalam fasilitas dan program yang lebih bervariasi, namun juga menimbulkan isu terkait aksesibilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengupas tuntas perbedaan dan kesamaan dalam

mekanisme pembiayaan pendidikan di kedua jenis sekolah tersebut. Dengan memahami secara mendalam bagaimana sumber dana diperoleh, dikelola, dan dialokasikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta strategi adaptif yang diterapkan oleh para pengelola sekolah. Hasil penelitian ini tidak hanya penting untuk literatur akademis, tetapi juga dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh haknya atas pendidikan berkualitas, tanpa terkendala oleh keterbatasan finansial.

B. Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena mekanisme pembiayaan pendidikan yang kompleks dan dinamis. Desain eksploratif digunakan untuk menggali informasi secara rinci mengenai sumber dana, pengelolaan, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh sekolah dasar negeri dan swasta. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data lapangan, tetapi juga didukung oleh studi literatur yang komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan Sekolah Dasar Negeri

Pembiayaan pada sekolah dasar negeri di Indonesia didominasi oleh peran sentral pemerintah, yang bertujuan untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan gratis bagi seluruh warga negara. Mekanisme pembiayaannya memiliki karakteristik yang khas dan berbeda secara fundamental dari sekolah swasta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan tulang punggung pembiayaan di sekolah dasar negeri. Ketergantungan ini bukan hanya sekadar dominan, melainkan seringkali menjadi satu-satunya sumber pendapatan rutin yang dapat diandalkan oleh sekolah. Dana BOS, yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, dirancang untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan tanpa memungut biaya dari orang tua siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Data dari wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah menunjukkan bahwa sekitar 80-90% anggaran sekolah negeri berasal dari dana BOS. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pusdatin Kemdikbudristek (2022) yang menyebutkan bahwa dana BOS adalah instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Sebagai konsekuensinya, kemampuan sekolah untuk melakukan program atau inovasi baru sangat bergantung pada ketersediaan dan fleksibilitas penggunaan dana BOS, yang diatur ketat oleh petunjuk teknis (Juknis). Ketergantungan ini menciptakan dualisme: di satu sisi, dana BOS menjamin akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat; di sisi lain, hal ini membatasi otonomi sekolah untuk mencari pendanaan lain. Sumbangan dari komite sekolah, meskipun diperbolehkan, seringkali tidak signifikan dan tidak bisa diwajibkan, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber dana utama (Yusuf & Rahman, 2019). Hal ini menjadikan sekolah negeri berada dalam posisi yang pasif, menunggu alokasi dana dari pemerintah, tanpa memiliki keleluasaan untuk merancang program pendanaan mandiri.

Pembiayaan Sekolah Dasar Swasta

Berbeda dengan sekolah negeri yang terikat pada dana pemerintah, sekolah dasar swasta memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, sehingga tidak bergantung pada satu sumber saja. Fleksibilitas ini menjadi ciri utama yang membedakan mekanisme pembiayaan sekolah swasta. Iuran peserta didik adalah sumber pendanaan utama bagi sebagian besar sekolah swasta. Iuran ini biasanya mencakup biaya bulanan, biaya pembangunan, dan biaya kegiatan. Besaran iuran ditentukan oleh yayasan atau pihak sekolah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti biaya operasional, kualitas layanan yang ditawarkan, dan daya beli masyarakat di sekitarnya. Sumber dana ini memberikan kepastian finansial yang memungkinkan sekolah merencanakan program jangka panjang dan investasi pada fasilitas (Sari, 2020). Banyak sekolah swasta berada di bawah naungan yayasan pendidikan. Sumbangan dari yayasan ini seringkali menjadi sumber dana cadangan atau dana untuk proyek-proyek strategis. Yayasan dapat memberikan subsidi untuk menutupi kekurangan operasional, mendanai pembangunan gedung baru, atau menyediakan beasiswa bagi siswa

berprestasi atau kurang mampu. Kontribusi yayasan ini membuat sekolah swasta lebih stabil secara finansial dan mampu menjaga kualitas layanan, bahkan di tengah tantangan ekonomi.

Sekolah swasta juga aktif dalam melakukan inisiatif penggalangan dana yang melibatkan orang tua, alumni, dan komunitas. Bentuknya beragam, mulai dari acara tahunan seperti bazar, pertunjukan seni, hingga donasi sukarela untuk proyek tertentu. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan dana tambahan, tetapi juga memperkuat ikatan antara sekolah dan komunitas, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kemajuan pendidikan (Yusuf & Rahman, 2019). Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah swasta untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang muncul, seperti pengadaan teknologi baru atau program pelatihan guru. Secara keseluruhan, fleksibilitas dalam mencari pendanaan ini memungkinkan sekolah swasta untuk memiliki anggaran yang lebih besar dan beragam, yang kemudian dapat dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperbarui sarana, serta mengembangkan program-program inovatif.

Sekolah dasar swasta menunjukkan otonomi yang lebih besar dalam mengelola keuangannya, yang berbeda secara signifikan dari sekolah negeri. Otonomi ini bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga memungkinkan sekolah untuk lebih adaptif dalam merespons kebutuhan spesifiknya.

Proses penyusunan anggaran di sekolah swasta seringkali lebih fleksibel dan partisipatif. Pihak yayasan, kepala sekolah, dan komite sekolah biasanya mengadakan musyawarah untuk menentukan prioritas pengeluaran. Keterlibatan orang tua melalui komite sekolah sangatlah vital. Mereka tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga seringkali berpartisipasi langsung dalam penentuan alokasi dana, seperti untuk perbaikan fasilitas atau pengembangan program ekstrakurikuler baru. Pola pengelolaan yang demikian memungkinkan sekolah swasta untuk menyesuaikan anggaran dengan visi dan misi pendidikan mereka tanpa terikat oleh aturan yang kaku (Yusuf & Rahman, 2019).

Fleksibilitas ini juga tercermin dalam alokasi anggaran yang lebih strategis. Sekolah swasta bisa menginvestasikan dana pada program-program inovatif, pelatihan guru, atau teknologi pembelajaran terbaru, yang mungkin sulit didanai oleh sekolah negeri. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan internal, yang memungkinkan sekolah merespons dinamika kebutuhan siswa dan tuntutan kualitas pendidikan yang terus berkembang (Sari, 2020). Berbeda dengan sekolah negeri yang alokasi anggarannya cenderung kaku, sekolah dasar swasta memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan dananya secara lebih beragam dan strategis. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi pada aspek-aspek yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran yang lebih fleksibel ini memungkinkan sekolah swasta untuk (1) Pengembangan fasilitas modern yaitu dana sering dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, seperti laboratorium komputer, perpustakaan yang lengkap, ruang kelas ber-AC, atau fasilitas olahraga yang memadai. (2) Sekolah swasta dapat menawarkan beragam pilihan ekstrakurikuler yang dibiayai penuh, seperti robotik, coding, musik, atau bahasa asing. Program-program ini dirancang untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di luar kurikulum wajib. (3) Sebagian besar anggaran sekolah swasta juga dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan profesional guru. Investasi ini bertujuan untuk memastikan guru memiliki kompetensi terkini dalam metode pengajaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran. Meskipun demikian, keleluasaan dalam alokasi anggaran ini sering kali memiliki konsekuensi. Besarnya biaya untuk investasi pada fasilitas dan program tersebut berimbas pada besaran iuran peserta didik yang lebih tinggi. Hal ini kemudian memicu isu aksesibilitas, di mana pendidikan berkualitas di sekolah swasta menjadi kurang terjangkau bagi sebagian besar keluarga. Keseimbangan antara kualitas layanan dan aksesibilitas menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh sekolah dasar swasta (Sari, 2020).

Perbandingan dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun memiliki pola pembiayaan yang berbeda, baik sekolah dasar negeri maupun swasta sama-sama menghadapi tantangan yang serupa: keterbatasan dana operasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Tantangan ini menjadi hambatan signifikan yang memengaruhi kemampuan sekolah untuk berinovasi dan memberikan layanan pendidikan terbaik. Keterbatasan dana operasional di sekolah negeri utamanya disebabkan oleh keterikatan pada Juknis (Petunjuk Teknis) BOS yang ketat. Meskipun dana BOS memastikan operasional dasar berjalan, alokasi dana untuk inovasi, pelatihan guru, atau pengadaan teknologi canggih seringkali tidak memadai atau terbatas oleh aturan. Hal ini membuat sekolah negeri sulit untuk keluar dari pola pembelajaran konvensional dan beradaptasi dengan

kebutuhan pendidikan modern (Pusdatin Kemdikbudristek, 2022). Di sisi lain, sekolah swasta terkendala oleh daya beli orang tua. Meskipun memiliki otonomi untuk menetapkan iuran, pihak sekolah harus menjaga iuran tetap terjangkau agar tidak kehilangan siswa. Kenaikan biaya operasional, inflasi, atau kebutuhan investasi baru sering kali sulit diimbangi dengan kenaikan iuran yang signifikan. Akibatnya, sekolah swasta juga harus berjuang untuk menyeimbangkan antara peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan biaya (Sari, 2020). Kesamaan tantangan ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan pendidikan di tingkat dasar adalah isu struktural yang melampaui jenis sekolah. Keduanya memerlukan strategi kreatif dan kebijakan yang mendukung untuk memastikan dana yang ada dapat dioptimalkan demi peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Meskipun sumber dan pengelolaan dananya berbeda, baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama menghadapi tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kedua hal ini krusial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan dana digunakan secara efektif.

Tantangan di Sekolah Negeri

Sekolah negeri seringkali bergulat dengan kerumitan administratif dalam pelaporan BOS. Prosedur yang ketat dan birokrasi yang berlapis menuntut bendahara sekolah untuk menguasai berbagai aturan dan format pelaporan. Sering kali, kesulitan ini bukan karena niat yang buruk, melainkan karena kurangnya pelatihan dan pemahaman teknis. Akibatnya, proses pelaporan menjadi lambat dan rumit, yang dapat menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat (Pusdatin Kemdikbudristek, 2022).

Tantangan di Sekolah Swasta

Di sekolah swasta, tantangan akuntabilitas muncul dari sisi lain. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap laporan keuangan terkadang menimbulkan miskomunikasi dan kecurigaan. Meskipun sekolah swasta memiliki otonomi untuk mengelola dananya, jika laporan keuangan tidak disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti atau tidak dikomunikasikan secara efektif, hal ini dapat mengikis kepercayaan. Transparansi di sini tidak hanya berarti keterbukaan data, tetapi juga kemampuan untuk menjelaskan alokasi dana secara rasional dan meyakinkan kepada para orang tua sebagai stakeholder utama (Yusuf & Rahman, 2019). Secara keseluruhan, tantangan transparansi dan akuntabilitas di kedua jenis sekolah ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas manajemen keuangan bagi pengelola sekolah. Keterampilan ini penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Keterlibatan pemangku kepentingan, terutama komite sekolah dan orang tua, merupakan faktor krusial dalam mekanisme pembiayaan di kedua jenis sekolah. Namun, peran dan tingkat keterlibatan mereka memiliki perbedaan yang signifikan.

Peran di Sekolah Negeri

Di sekolah negeri, peran komite sekolah dan orang tua lebih berfokus pada fungsi pengawasan. Berdasarkan peraturan, komite sekolah bertugas memberikan masukan, mengawasi, dan mendukung program sekolah, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan anggaran. Partisipasi mereka dalam pendanaan bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga kontribusinya tidak signifikan terhadap total anggaran sekolah. Peran utama mereka adalah memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan (Yusuf & Rahman, 2019).

Peran di Sekolah Swasta

Sebaliknya, di sekolah swasta, peran komite sekolah dan orang tua jauh lebih vital dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan serta pendanaan. Mereka sering dilibatkan secara aktif dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), menentukan besaran iuran, dan mengawasi implementasi program. Partisipasi finansial dari orang tua melalui iuran menjadi sumber dana utama, yang membuat mereka memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan sekolah. Keterlibatan yang kuat ini menciptakan hubungan kemitraan yang erat antara sekolah, orang tua, dan yayasan dalam mencapai tujuan pendidikan bersama (Sari, 2020). Perbedaan peran ini mencerminkan struktur pembiayaan masing-masing sekolah. Di sekolah negeri, yang didanai pemerintah, pengawasan menjadi prioritas. Sementara di sekolah swasta, yang didanai oleh masyarakat, kemitraan dan partisipasi langsung menjadi kunci keberlanjutan.

Strategi Adaptif dan Inovasi

1. Sekolah Negeri

Mengingat ketergantungan yang tinggi pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah negeri mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaannya. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan dana BOS seefektif mungkin sesuai dengan batasan yang diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah. Optimalisasi dana BOS dilakukan dengan cara (1) Fokus pada kebutuhan prioritas yaitu sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan relevan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Misalnya, anggaran difokuskan pada pembelian bahan ajar, alat peraga, atau perbaikan kecil yang secara langsung mendukung kualitas pembelajaran. (2) Efisiensi anggaran yaitu sekolah menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap pengeluaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pemasok dengan harga terbaik, membandingkan kualitas barang, atau memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Tujuannya adalah agar dana yang terbatas dapat menjangkau lebih banyak kegiatan (Wahyudi, 2021). (3) Pemanfaatan maksimal juknis pengelola sekolah yang cerdas akan memahami secara mendalam setiap detail Juknis BOS. Mereka mencari celah atau fleksibilitas yang diperbolehkan oleh aturan untuk mendanai program-program yang tidak secara eksplisit disebut, tetapi masih relevan dengan tujuan pendidikan. Meskipun strategi ini membantu sekolah bertahan, keterbatasan dana dan Juknis yang kaku tetap menjadi tantangan. Namun, dengan optimalisasi ini, sekolah negeri berupaya maksimal untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dengan sumber daya yang ada (Pusdatin Kemdikbudristek, 2022). Selain mengoptimalkan dana BOS, sekolah negeri juga mengadopsi strategi kolaborasi dengan pihak ketiga atau komunitas untuk mendapatkan sumber daya non-finansial. Strategi ini menjadi penting mengingat terbatasnya dana BOS untuk kebutuhan di luar operasional rutin. Bentuk kolaborasi ini bervariasi, meliputi (1) Sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal atau organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR). Bantuan ini bisa berupa peralatan, buku-buku, atau program pelatihan singkat untuk siswa dan guru. (2) Komunitas alumni dapat menjadi sumber daya berharga. Mereka seringkali memberikan sumbangan dalam bentuk keahlian, seperti menjadi mentor bagi siswa, atau donasi berupa peralatan yang sudah tidak terpakai namun masih layak digunakan (Yusuf & Rahman, 2019). (3) Masyarakat dan orang tua yang tergabung dalam komite sekolah juga dapat berkontribusi melalui tenaga sukarela untuk perbaikan fasilitas atau penyelenggaraan acara sekolah.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa sekolah negeri tidak sepenuhnya pasif dalam hal pendanaan. Meskipun tidak berfokus pada penggalangan dana tunai, mereka aktif membangun jejaring sosial untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tercover oleh dana BOS. Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah (Pusdatin Kemdikbudristek, 2022). Untuk mengatasi keterbatasan dana, sekolah negeri menerapkan strategi efisiensi anggaran dengan melakukan penghematan pada biaya operasional rutin. Strategi ini menjadi langkah proaktif untuk memastikan setiap rupiah dari dana BOS digunakan secara maksimal. Langkah-langkah efisiensi yang umum dilakukan meliputi: (1) Sekolah memprioritaskan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar dan menekan biaya untuk kegiatan yang kurang penting. (2) Penghematan energi, air, dan alat tulis kantor menjadi praktik umum. Misalnya, penggunaan listrik hanya saat diperlukan atau pencetakan dokumen yang lebih selektif. (3) Penggunaan platform digital untuk komunikasi dan administrasi juga menjadi cara untuk mengurangi biaya cetak dan distribusi surat. Dengan menerapkan efisiensi, dana yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional rutin dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan ringan atau pengadaan bahan ajar. Strategi ini menunjukkan upaya sekolah untuk mengelola dana terbatas secara bertanggung jawab dan efektif (Wahyudi, 2021).

2. Sekolah Swasta

Fleksibilitas yang dimiliki sekolah swasta memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi diversifikasi pendanaan yang kreatif, tidak hanya mengandalkan iuran bulanan siswa. Strategi ini sangat penting untuk menutupi kekurangan dana, membiayai program-program inovatif, dan mengurangi beban finansial orang tua. Beberapa program penggalangan dana kreatif yang umum dilakukan oleh sekolah swasta antara lain (1) Bazar sekolah dan acara amal ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sumber dana tambahan yang efektif. Dana yang terkumpul dari penjualan produk atau tiket amal dapat dialokasikan untuk proyek tertentu, seperti renovasi perpustakaan atau pengadaan alat musik baru. (2) Kemitraan dengan bisnis lokal dapat menjalin kemitraan dengan bisnis di sekitar mereka untuk

mendapatkan sponsor atau donasi dalam bentuk barang maupun jasa. (3) Inisiatif *fundraising* digital, sekolah swasta juga mulai memanfaatkan platform media sosial atau *crowdfunding* untuk mengumpulkan donasi dari alumni dan masyarakat yang peduli. Strategi diversifikasi ini menunjukkan bahwa sekolah swasta tidak hanya mengandalkan biaya yang dipungut dari siswa, tetapi juga aktif membangun hubungan dengan komunitas yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan adalah investasi bersama yang melibatkan berbagai pihak (Sari, 2020). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan keberlanjutan finansial, sekolah swasta juga mengadopsi strategi kemitraan strategis. Strategi ini melibatkan kerja sama dengan perusahaan atau lembaga lain untuk mendapatkan dukungan berupa sponsor atau beasiswa. Kemitraan ini tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga memperluas jaringan sekolah dan memberikan nilai tambah bagi siswa. Bentuk kemitraan strategis ini antara lain (1) Sekolah menjalin hubungan dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan sponsor bagi acara-acara tertentu, seperti *open house*, kompetisi, atau pembangunan fasilitas baru. Sebagai imbalannya, perusahaan dapat mempromosikan produk atau *brand* mereka di lingkungan sekolah. (2) Sekolah bekerja sama dengan yayasan, bank, atau perusahaan untuk menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi atau siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini membantu sekolah menarik siswa terbaik dan meningkatkan citra sosial mereka. (3) Sekolah juga dapat menjalin hubungan yang erat dengan para alumnusnya yang sukses. Para alumnus ini seringkali bersedia memberikan donasi, baik dalam bentuk uang, peralatan, maupun program pelatihan.

Strategi ini menunjukkan bahwa sekolah swasta tidak hanya mengandalkan biaya yang dipungut dari siswa, tetapi juga aktif membangun hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan adalah investasi bersama yang melibatkan berbagai pihak (Sari, 2020). Strategi pengelolaan keuangan di sekolah swasta didasarkan pada pengelolaan berbasis prioritas. Otonomi yang mereka miliki memungkinkan pengelola sekolah, bersama dengan yayasan dan komite, untuk mengalokasikan dana secara strategis pada program-program yang dianggap paling berdampak langsung pada mutu pendidikan. Pendekatan ini berfokus pada (1) Identifikasi kebutuhan strategisdengan cara sekolah secara rutin mengevaluasi kebutuhan siswa dan guru, serta tren pendidikan terkini. Anggaran kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti investasi pada teknologi pembelajaran terbaru, pengembangan kurikulum inovatif, atau peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan bersertifikasi. (2) Investasi jangka panjang alih-alih hanya berfokus pada pengeluaran rutin, sekolah swasta juga memprioritaskan investasi jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas modern atau pengadaan peralatan canggih. Investasi ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dan daya saing bagi sekolah dalam jangka waktu lama. (3) Setiap alokasi anggaran dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Jika suatu program tidak memberikan hasil yang signifikan, dananya dapat dialihkan ke program lain yang lebih efektif (Sari, 2020). Dengan pengelolaan berbasis prioritas, sekolah swasta dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mendukung visi dan misi sekolah, serta memberikan nilai terbaik bagi siswa dan orang tua.

D. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri dan swasta memiliki pola, tantangan, dan strategi yang berbeda secara fundamental.

1. Karakteristik pembiayaan berbeda

Sekolah dasar negeri sangat bergantung pada Dana BOS dari pemerintah, yang menjamin akses pendidikan yang terjangkau namun membatasi fleksibilitas anggaran. Sebaliknya, sekolah dasar swasta memiliki otonomi finansial yang lebih besar, mengandalkan iuran peserta didik, sumbangan yayasan, dan berbagai inisiatif penggalangan dana.

2. Tantangan serupa

Meskipun sumber dananya berbeda, kedua jenis sekolah sama-sama menghadapi keterbatasan dana operasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Sekolah negeri terhambat oleh Juknis yang kaku, sementara sekolah swasta terkendala oleh daya beli orang tua. Keduanya juga bergumul dengan isu transparansi dan akuntabilitas, baik karena kerumitan birokrasi (negeri) maupun miskomunikasi dengan orang tua (swasta).

3. Strategi adaptasi unik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, kedua sekolah mengembangkan strategi yang berbeda. Sekolah negeri fokus pada optimalisasi dana BOS, efisiensi anggaran, dan

kolaborasi non-finansial dengan komunitas. Sementara itu, sekolah swasta mengandalkan diversifikasi pendanaan, kemitraan strategis, dan pengelolaan berbasis prioritas untuk mengalokasikan dananya secara efektif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tidak ada satu model pembiayaan yang sempurna. Setiap jenis sekolah memerlukan pendekatan yang spesifik dan adaptif. Rekomendasinya adalah mendorong kebijakan pembiayaan yang lebih berkeadilan dan fleksibel, yang mempertimbangkan karakteristik unik masing-masing sekolah, sambil tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

E. Referensi

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusdatin Kemdikbudristek. (2022). Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pengaruhnya terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 1(1), 1-15.
- Sari, D. R. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Swasta: Studi Kasus Pengelolaan Dana dari Iuran Peserta Didik dan Donasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 15(2), 123-140.
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2019). Peran Komite Sekolah dalam Pengawasan Anggaran dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 32-48.